

BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP)

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin dibidang industri, perlu menetapkan tata cara pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP) dipandang perlu mengatur ketentuan dan tata cara pemberian izin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 590 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan(IP);
- 16. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
- 17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
- Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagai mana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP);
- 4. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara;
- 5. Jenis Industri adalah bagian sesuatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- 6. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- 7. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

Pasal 2

(1). Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI;

(2). Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecii dikecualikan dari kewajiban untuk

Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) meliputi semua jenis Industri sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha;

Terhadap jenis industri tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (3), cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI;

BAB II PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP)

Pasal 3

(1). Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industril kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;

Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh

(3). Terhadap semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 4

(1). Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip;

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan;

(3). Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan;

(4). Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial, dan;

(5). IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-Undang Gangguan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 5

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 6

(1). IUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan-perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang;

(2). IUI dan IP untuk perusahaan penanaman modal asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Pelaksanaannya.

Pasal 7

- IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 07/M-IND/PER/5/2005;
- (2). Bagi komoditi industri yang belum ditetapkan jenisnya dalam keputusan ini pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut;
- (3). Komoditi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan pemberian izinnya berada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Tugas dan Kewenangan sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Pasal 8

- (1). Bagi perusahaan industri yang :
 - a. jenis industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/SK/7/1995 tentang penetapan jenis komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau;
 - b. tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip.

- (2). Bagi perusahaan industri yang :
 - a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, tetapi wajib membuat surat pernyataan;
 - b. jenis industrinya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip tetapi wajib membuat surat pernyataan.

- (1). Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersil sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai IUI diterbitkan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2). Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Formulir SP-1 pada Lampiran XXIV Peraturan ini;

(3). Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh perusahaan/pengelola Kawasan Industri dan hasilnya dilaporkan kepada menteri dan pejabat yang ditunjuk;

Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dalam Kabupaten Aceh Utara dipantau oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;

Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 10

- (1). Pengajuan Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I pada Lampiran II
- (2). Pengajuan permintaan IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini.

- (1). Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Formulir Model Pm-I pada Lampiran II Peraturan ini;
- (2). Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-I pada Lampiran XII Peraturan ini;
- (3). Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini:
- (4). Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Persetujuan Prinsip, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini;
- (5). Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan;
- (6). Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan;
- (7). Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali

- paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II pada Lampiran III Peraturan ini dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan;
- (8). Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambatlambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI;
- (9). Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Pm-I pada Lampiran II Peraturan ini.

- Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai dan telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini;
- (2). Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (3). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini atau tembusannya, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi;
- (4). Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II pada Lampiran XIII Peraturan ini dan dilaporkan kepada Bupati Aceh Utara serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan;
- (5). Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersil kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (6). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III pada Lampiran XIV Peraturan ini atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 13

- (1). Pengajuan permintaan IUI menggunakan Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan Formulir Model SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini;
- (2). Pengajuan permintaan Izin Perluasan menggunakan Formulir Model SP III pada Lampiran XXVI Peraturan ini.

- (1). Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan mengisi Daftar Isian untuk Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan;
- (2). Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan langsung oleh Perusahaan Inndustri kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
- (3). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini, SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir SP VI pada Lampiran XXIV Peraturan ini;
- (4). Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuam pembangunan pabrik sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II pada Lampiran III Peraturan ini kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (5). Apabila pemegang IUI Model SP VI pada Lampiran XXIX Peraturan ini tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya;
- (6). Bagi Perusahaan Industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permintaan IUI yang baru dengan menggunakan Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan Daftar Isian Formulir Model SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini.

BAB V TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 15

- (1). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan;
- (2). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup;
- (3). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 16

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal;
- (2). Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini atau SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara guna disahkan dengan Izin Perluasan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.

- (1). Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini;
- (2). Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan Formulir Model SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini;
- (3). Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini atau SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;

(4). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-IV pada Lampiran IV Peraturan ini atau SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir :

a. Model SP-VII pada Lampiran XXXI Peraturan ini bagi yang IUI-nya Tanpa Melalui

Tahap Persetujuan Prinsip;

b. Model Pi-IV pada Lampiran XVI Peraturan ini bagi yang IUI-nya Melalui Tahap

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN TDI

Pasal 19

- (1). Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI;
- (2). Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya TDI wajib mendaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- (3). Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memperoleh TDI tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 20

- (1). Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan mengisi Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini;
- (2). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Tanda Daftar Industri dengan menggunakan Formulir Model Pdf.II-IK pada Lampiran XXIII Peraturan ini.

BAB VII PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 21

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) tiga kali berturut-turut;
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

Pasal 22

- (1). Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1);
 - b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara;

- (2). Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan IUI;
- (3). Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

BAB VIII PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 23

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Izin wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII pada Lampiran XXXII Peraturan ini.

Pasal 24

- (1). Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model SP-I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII pada Lampiran XXXII Peraturan ini dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara;
- (2). Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI;
- (3). Terhadap perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model SP-I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII pada Lampiran XXXII Peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

Pasal 25

- (1). Terhadap Surat Penolakan IUI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara, baik yang melalui Persetujuan Prinsip maupun yang Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Izin;
- (2). Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 26

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru.

BAB IX PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TDI

Pasal 27

Terhadap permintaan TDI yang diterima ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan TDI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII Peraturan ini.

Pasal 28

(1). Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan di dalam Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan TDI, wajib mengeluarkan Surat

Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII Peraturan ini;

- (2). Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan;
- (3). Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII Peraturan ini.

Pasal 29

- (1). Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Permintaan TDI;
- (2). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

BAB X PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

- (1). Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2);
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Keputusan ini;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketetentuan dalam Pasal 38 Keputusan ini;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
- (2). Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII pada Lampiran XIX Peraturan ini.

Pasal 31

- (1). Terhadap Perusahaan Industri yang:
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2);
 - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek,

IUI dan TDI perusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII pada Lampiran XX Peraturan ini;

- (2). Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri;
- (3). Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
- (4). Apabila dalam Pembekuan Izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

- (1). IUI/TDI dapat dicabut apabila:
 - a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan Industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TDI.
- (2). Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis;
- (3). Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI/TDI adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang diberi wewenang oleh Bupati Aceh Utara untuk menerbitkan IUI/TDI;
- (4). Pencabutan IUI/TDI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX pada Lampiran XXI Peraturan ini.

BAB XI INFORMASI INDUSTRI

Pasal 33

- (1). Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang diberi wewenang memberikan IUI dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V pada Lampiran VI Peraturan ini untuk Informasi Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-IV pada Lampiran XXVII Peraturan ini untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, serta
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI pada Lampiran VII Peraturan ini untuk Informasi Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-V pada Lampiran XXVIII Peraturan ini untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2). Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara menggunakan Formulir Model Pdf.III-IK pada Lampiran XI Peraturan ini;
- (3). Semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1). Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang berwenang mengeluarkan IUI/TDI berdasarkan Peraturan ini dengan menggunakan:
 - a. Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini untuk pengganti IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini untuk pengganti IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini untuk pengganti TDI.
- (2). Setiap permohonan pengganti IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut;
- (3). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
 - a. Formulir Model Pi-IIIA pada Lampiran XV Peraturan ini untuk pengganti IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;

b. Formulir Model SP-VIA pada Lampiran XXX Peraturan ini untuk pengganti IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;

c. Formulir Model Pdf.II-IK pada Lampiran X Peraturan ini untuk pengganti TDI.

Pasal 35

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini, berlaku juga bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 36

- (1). Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang memeberikan IUI atau TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru;
- (2). Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- (3). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang memberikan IUI atau TDI di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X pada Lampiran XXII Peraturan ini dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di tempat yang baru.

Pasal 37

- (1). Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang memberikan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman;
- (2). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan persetujuan atau Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V pada Lampiran XVII Peraturan ini dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 38

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib:

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 39

Bentuk/model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 40

Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan biaya retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

Pasal 41

Apabila Pejabat yang telah diberi wewenang untuk pemberian IUI, izin Perluasan dan TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI, Izin Perluasan dan TDI.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1). Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (4), Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 33 Peraturan ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 42 ayat (2) Peraturan ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, dan;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Bagi perusahaan yang telah mendapatkan IUI, TDI atau IP berdasarkan peraturan perundangundangan berlaku sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang/registrasi sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan ini.

BAB XVI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 45

- (1). Dengan nama Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan (IP) dipungut retribusi sebagaimana pembayaran atas jasa pemberian izin atau Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2). Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan ;
- (3). Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasaran instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan;

(4). Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil, dan ;

(5). IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang Gangguan, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya PengololaanLingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 46

Apabila perusahaan industri melakukan perubahan kepemilikan, komoditi dan lokasi, maka perusahaan tersebut wajib melakukan permohonan perubahan IUI serta dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan retribusi IUI.

- (1). IUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dengan kewajiban melakukan daftar ulang/registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (2). Daftar ulang/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang.

BAB XVII CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 48

- (1). Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi usaha industri;
- (2). Klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu:
 - a. Izin Usaha Indutri (IUI);
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI), dan;
 - c. Izin Perluasan (IP).

BAB XVIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 49

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya atas pelayanan yang diberikan;
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian;

BABXIX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. IUI atau TDI dengan nilai investasi antara:
 - 1. Rp. 5.000.000,s/d Rp. 100.000.000,sebesar Rp. 100.000,-
 - 2. Rp. 100.000.000,- keatas s/d Rp. 200.000.000,sebesar Rp. 150,000.-
 - 200.000.000,- keatas s/d 3. Rp. Rp. 500.000.000,sebesar Rp. 500.000,-
 - 4. Rp. 500.000.000,- keatas s/d 1.000.000.000,-Rp. sebesar Rp. 750.000,-Rp. 1.000.000.000,- keatas s/d Rp. sebesar Rp. 1.000.000,-......
- b. IP adalah sama dengan IUI sebagaimana dimaksud pada butir a;
- c. Daftar ulang/registrasi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TDI atau IUI atau IP sebagaimana dimaksud pada butir a dan b.

BAB XX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi dipungut di tempat izin atau TDI itu diberikan.

BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atu IP;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan;
- (3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan 10% dari besarnya pungutan retribusi dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>20 Februari 2007 M</u> 2 Syafar 1428 H

H. TEUKU PRIBADI

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN Pasal 52

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atu IP;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan;
- (3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan 10% dari besarnya pungutan retribusi dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII PENUTUP Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>20 Februari 2007 M</u> 2 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/Dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>20 Februari</u> <u>2007 M</u>

2 Shafar

1428 H

SEKRETARIS DAFRAH

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si

Pembina Utama Muda Nip. 110 037 971

BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN Pasal 52

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atu IP;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan;
- (3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan 10% dari besarnya pungutan retribusi dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII PENUTUP Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>20 Februari 2007 M</u> 2 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/Dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>20 Februari 2007 M</u> 2 Shafar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

<u>Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si</u> Pembina Utama Muda

Nip. 110 037 971

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

A. INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

KBLI	URAIAN			
	INDUSTRI MAKANAN			
15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging			
15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya			
15122	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya			
	Industri Pengasapan/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya			
15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainya			
15125	Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya			
15129	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainya untuk Ikan dan Biota Perairan lainnya			
15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani			
15142	Industri Margarine			
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa			
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit			
15145	Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani			
	Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani			
	Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainya			
	Industri Pegupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)			
	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat (Kakao)			
	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan			
	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (Termasuk Rhizoma)			
	Industri Kopra			
	Industri Tepung Terigu			
15322	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian			
45000	dan Sejenisnya			
	Industri Pati Ubi Kayu			
	Industri Berbagai Macam Pati Palma			
	Industri Pati lainya			
	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan Industri Konsentrat Pakan Ternak			
	Industri Roti dan Sejenisnya Industri Gula Pasir, hanya untuk			
13421	1). 15421.0199 Refined Sugar (Gula Kristal Rafinasi)			
15422	Industri Gula Merah			
	Industri Gula lainya			
	Industri Pengolahan Gula lainya selain Sirup			
	Industri Bubuk Coklat			
	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula			
	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya			
15493	Industri Kecap			
	Industri Tempe			
15495	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan lainya selain Kecap dan Tempe			
15496	Industri Kerupuk dan sejenisnya			
	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan			
	Industri Kue-kue Basah			
	Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain			
24119	Industri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, hanya untuk			
	1). 24119.0313 Glutamic Acid			
	2). 24119.9701 Monosodium Glutamate (MSG)			
1				

KBLI	URAIAN					
	INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU					
15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran					
	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran					
	Industri Peligasinan Penanisan Buah-buahan dan Sayuran					
	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran					
	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainya untuk Buah-buahan dan Sayuran					
	Industri Susu					
15212	Industri Makanan dari Susu					
15213	Industri Es Krim					
15313	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi					
1	Industri Sirop					
	Industri Pengolahan Teh dan Kopi					
	Industri Es					
and the second second second second	Industri Anggur dan Sejenisnya					
	Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt Industri Minuman Ringan (Soft Drink)					
	Industri Minuman Ringan (Sort Drink) Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau					
1	Industri Rokok Kretek					
1	Industri Rokok Putih					
1	Industri Rokok lainnya					
	Industri Hasil Lainnya Dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobut/Kawung					
	Industri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, hanya untuk					
	1). 24119.9703 Saccharine					
2). 24119.9704 Natrium Siklamat						
	INDUCTOL HACH LINETAN DAN DEDICED					
	INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN					
00100						
	Industri Pengawetan Kayu					
1	Industri Rotan, Bambu dan Sejenisnya					
20104 Industri Pengolahan Rotan 20213 Industri Panel Kayu lainnya						
1	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan					
1	Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati					
	Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu					
	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu					
	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Furniture					
1	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu					
20299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain					
	Industri Bubur Kertas (Pulp)					
	Industri Kertas Budaya					
	Industri Kertas Berharga					
1	Industri Kertas Khusus					
	Industri Kertas Industri					
1	Industri Kertas Tissue					
	Industri Kertas lainnya Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton					
1	Industri Remasan dan Kotak dan Kertas dan Karton Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak diklasifikasikan ditempat lain					
	Industri Balang dan Kertas dan Karton yang tidak diklasilikasikan ditempat lain Industri Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya					
	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah					
1	Industri Penerbitan lainnya					
1	Industri Percetakan					
1	Industri Jasa Penunjang Percetakan					
	Industri Minyak Atsiri					
	Industri Pengasapan Karet					
	Industri Remiling Karet					
25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)					
1	Industri Furniture dari Kayu					
36102	Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu					
1						

	KBLI	URAIAN		
		INDUSTRI KIMIA HULU		
	23100	Industri Barang-barang dari Batubara		
		Industri Barang-barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi		
- 1		Industri Pembuatan Minyak Pelumas		
- 1		Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas		
		Industri Kimia Dasar Anorganik, Khlor dan Alkali kecuali 24111.0206; 24111.0207; 24111.02		
		Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri		
1		Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen		
		Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain		
- 1		Industri Kimia Dasar Anorganik, yang bersumber dari hasil pertanian		
		Industri Kimia Dasar Organik, bahan baku, zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen		
- 1		Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari minyak bumi dan gas bumi dan batu bara		
		Industri Kimia Dasar Organik, yang menghasilkan bahan kimia khusus (specialty chemicals)		
- 1		Industri Kimia Dasar Organik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain kecuali 24119.0313;		
		24119.9701; 24119.9703; dan 24119.9704		
	24121	Industri Pupuk Alam/Sintetis Hara Makro Primer		
	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer		
	24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer		
- 1		Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer		
- 1		Industri Pupuk Hara Makro Sekunder		
		Industri Pupuk Hara Mikro		
		Industri Pupuk Pelengkap		
		Industri Pupuk Lainnya		
24131 Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik				
24132 Industri Karet Buatan		State of the september		
- 1		Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)		
		Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Industri Zat Pengatur Tumbuh		
		Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)		
- 1		Industri Bahan Farmasi		
- 1		Industri Bahan Peledak		
		INDUSTRI KIMIA HILIR		
	2/111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali, hanya untuk :		
	27111	1). 24111.0206 Natrium Khlorida/Garam Meja		
1		2). 24111.0207 Natrium Khlorida/Garam Industri		
		3). 24111.0208 Natrium Khlorida Murni/untuk Farmasi		
	24221	Industri Cat		
1		Industri Pernis		
	24223	Industri Lak		
	24241	Industri Sabun, dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi		
	24242	Industri Kosmetik		
	24291	Industri Perekat/Lem		
1		Industri Tinta		
		Industri Korek Api		
1		Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya		
		Industri Ban Luar dan Ban Dalam		
1		Industri Vulkanisir Ban		
		Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga		
		Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192		
		Industri Pipa dan Slang dari Plastik		
		Industri Barang Plastik Lembaran		
		Industri Media Rekam dari Plastik (Cakram Optik)		
		Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)		
		Industri Kemasan dari Plastik		
	25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik		
		Industri Barang-barang Plastik Lainnya		
Ì				

r	KBLI	URAIAN		
1	26111	Industri Kaca Lembaran		
26112 Industri Kaca Pengaman		Industri Kaca Pengaman		
	26119	119 Industri Kaca Lainnya		
1	26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas		
1	26122	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas		
1		Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul		
	26124	Industri Kemasan dari Gelas		
-	26129	Industri Barang-barang Lainnya dari Gelas		
		Industri Perlengkapan Rumah Tangga dan Porselin		
		Industri Bahan Bangunan dan Porselin		
1	minetial house has	Industri Alat-alat Laboratorium dan Alat Listrk/Tehnik dari Porselin		
		Industri Barang-barang Lainnya dari Porselin		
		Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya		
		Industri Barang-barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya		
26321 Industri Barang-baran		Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga		
26322 Industri Batu Bata Dari Tanah Liat				
26323 Industri Genteng dari Tanah Liat		1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960		
26324 Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng				
		Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat		
	New York Control of the Control of t	Industri Semen		
26412 Industri Kapur				
1		Industri Gips		
		Industri Barang-barang dari Semen		
1		Industri Barang-barang dari Kapur		
1		Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi		
		Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya		
		Industri Barang-barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan		
1		Industri Barang-barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan		
1		Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan		
1		Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya		
1		Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan		
-		Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri		
		Industri Barang-barang dari Asbes Lainnya		
		Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya		
		Industri Furnitur dari Plastik		
	36109	Industri Furnitur Yang Belum Tercakup dalam Kelompok 36101 hingga 36104		

B. INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA

	KBLI	URAIAN			
		INDUSTRI LOGAM			
		INDUSTRI LOGAM			
	27101	Industri Besi dan Baja Dasar			
		Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)			
		Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi			
	race and a second of the second of	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi			
		Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi			
		Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja			
		Industri Pengecoran Besi dan Baja			
		Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja			
		Industri Barang-barang Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan			
1		Industri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan			
1		Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan			
		Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya			
		Industri Bejana Tekan, dan Tangki Dari Logam Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam			
		Jasa Industri Utk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam			
		Industri Alat Pertukaran Dari Logam			
-	28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat Lain yang Digunakan Dalam Rumah Tangga			
1		Industri Peralatan Lainnya Dari Logam			
		Industri Alat-alat Dapur			
1		Industri Peralatan Kantor Dari ogam, Tidak Termasuk Furnitur			
1		Industri Paku, Mur dan Baut Industri Macam-macam Wadah Dari Logam			
1		Industri Macam-macam Wadan Dari Logam Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat			
		Industri Pembuatan Profil			
		Industri Lampu Dari Logam			
		Industri Barang Logam Lainnya Yang Belum Termasuk Kelompok Manapun			
		Industri Kabel Listrik dan Telepon Industri Furniture Dari Logam			
		Daur Ulang barang-barang Logam			
1					
1		INDUSTRI MESIN			
	25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, hanya untuk : 1). 25206.01 Komponen Mesin			
1	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin, hanya untuk :			
1		1). 26203.0201 Plate Isolator Dari Porselin			
1		2). 26203.0202 Isolator Tegangan Tinggi/Rendah Dari Porselin			
		3). 26203.0203 Ceramic Tube			
1		4). 26203.0204 Rumah Sekering5). 26203.0205 Ceramic Insulator Fitting			
1		6). 26203.0206 Ceramic Electric Outlet			
		7). 26203.0299 Alat Listrik dan Teknik Lainnya dari Porselin			
1	28931	Industri Alat Pertanian Dari Logam			
		Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir			
- 1		Industri Motor Pembakaran Dalam			
		Industri Komponen Dari Suku Cadang Motor Penggerak Mula Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula			
		Industri Pompa dan Kompresor			
		Industri Transmisi Mekanik			
		Industri Tungku dan Alat Pemanas Sejenis Yang tidak Menggunakan Arus Listrik, (Bukan Untuk			
		Keperluan Rumah Tangga)			
		Industri Tungku, Oven dan alat Pemanas Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik			
	Market Commence of the Commenc	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan, dan Pengalengan			
		Industri Mesin Timbangan			
	-	madati Moditi i ilibaligati			

Γ	KBLI	URAIAN				
1	KDLI	UNAM				
	29193	Industri Mesin Pendingin, Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga				
1	29199	Industri Mesin Umum Lainnya				
1	Name of the Control o	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan				
	are the meaning of	lasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan				
1		Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam				
-	29222 Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu					
1	29223 Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Material Selain Logam dan Kayu					
1	December of temperature of	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang menggunakan Arus Listrik				
		Industri Mesin-mesin Metalurgi Industri Mesin-mesin Untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi				
		Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau				
		Industri Kabinet Mesin Jahit				
		Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengering				
		Industri Mesin Tekstil				
	29264	Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut				
-	machine to the same of the	Industri Mesin-mesin Untuk Percetakan				
	29292	Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas				
	29299	Industri Mesin Khusus Lainnya				
	SEC AL SECTION	Industri Motor Listrik				
4		Industri Mesin Pembangkit listrik				
	31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol				
		Tegangan (Voltage Stabilizer)				
1		Industri Panel listrik dan Switch Gear				
-		Industri Perabot Untuk Operasi, Perawatan, dan Kedokteran Gigi				
	SECTION OF STREET	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic				
-		Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual				
	752570E7 XVENUEDO					
1	00100	Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri				
		INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL				
	17111	Industri Descionas Coset Talistil				
1		Industri Persiapan Serat Tekstil Industri Pemintalan Benang				
		Industri Pemintalan Benang Jahit				
		Industri Penenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goní dan Karung Lainnya)				
	EDUCTION CONTRACTOR AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	Industri Kain Tenun Ikat				
	Sound (brothsetth)	Industri Penyempurnaan Benang				
		Industri Penyempurnaan Kain				
	17123	Industri Pencetakan Kain				
	19890 19890 42	Industri Batik				
		Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi				
		Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan				
		Industri Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kosmetika				
		Industri Karung Goni				
		Industri Bagor dan Karung Lainnya				
		Industri Permadani (Babut) Industri Tali				
	900000000000000000000000000000000000000	Industri Tali Industri Barang-barang dari Tali				
		Industri Barang-barang dan Tali Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)				
		Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri				
	randy a transfer of the	Industri Bordir/Sulaman				
		Industri Non Woven				
	STANDARD ST	Industri Kain Ban				
	17299	Industri Tekstil Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain				
		Industri Kain Rajut				
	the second second	Industri Pakaian Jadi Rajutan				
		Industri Rajutan Kaos Kaki				
		Industri Barang Jadi Rajutan				
	1	Industri Kapuk				
	18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil				
		1				

18102 18201 18203 19113 19113 1913 194301 194302 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Tekstil 18203 19113 1913 19143 19143 1915 194301 194302 Industri Serat atau Benang Filamen Buatan 194302 Industri Serat Stapel Buatan INDUSTRI ANEKA 18103 18104 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
18201 Industri Bulu Tiruan 18203 Industri Pencelupan Bulu 19113 Industri Kulit Buatan/Imitasi 24301 Industri Serat atau Benang Filamen Buatan 18202 Industri Serat Stapel Buatan INDUSTRI ANEKA 18103 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
18203 19113 24301 1ndustri Kulit Buatan/Imitasi 24302 Industri Serat atau Benang Filamen Buatan Industri Serat Stapel Buatan INDUSTRI ANEKA 18103 18104 18202 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris Industri Pengawetan Kulit						
19113 Industri Kulit Buatan/Imitasi 24301 Industri Serat atau Benang Filamen Buatan INDUSTRI ANEKA 18103 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit 18104 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
24301 Industri Serat atau Benang Filamen Buatan INDUSTRI ANEKA 18103 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris Industri Pengawetan Kulit						
INDUSTRI ANEKA INDUSTRI ANEKA Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris Industri Pengawetan Kulit						
INDUSTRI ANEKA 18103 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit 18104 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
18103 Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit 18104 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
18104 Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit 18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
18202 Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris 19111 Industri Pengawetan Kulit						
19111 Industri Pengawetan Kulit						
19112 Industri Kenyamanan Kulit	1					
19121 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi						
19122 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri						
19123 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan						
19129 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya						
19201 Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari						
19202 Industri Sepatu Olahraga						
19203 Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri						
19209 Industri Alas Kaki Lainnya						
33201 Industri Kaca Mata						
33202 Industri Teropong dan Alat Optik						
33300 Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya						
36911 Industri Permata						
36912 Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia						
36913 Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam						
36914 Industri Barang untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia						
36915 Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mu	lia					
36921 Industri Alat-alat Musik Tradisional						
36922 Industri Alat-alat Musik Non Tradisional						
36930 Industri Alat Barrasinas						
36941 Industri Alat Permainan						
36942 Industri Mainan						
36991 Industri Alat-alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya 36992 Industri Pita Mesin Tulis/Gambar						
36992 Industri Pita Mesin Tulis/Gambar 36993 Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain						
36999 Industri Pengolahan Lain yang Belum Termasuk Golongan Manapun (a.l. kancin	a corona					
payung, korek api, korek api gas, rambut palsu)	y sorony,					
37200 Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam						
or 200 Baar Olding Baraing Barain Logain						

C. INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

KBLI	URAIAN			
	INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DAN KEDIRGANTARAAN			
	INDUSTRIALAT TRANSPORTASI DARAT DAN KEDIRGANTARAAN			
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, hanya untuk :			
	1). 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor			
1	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)			
1	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			
1	Industri Karosen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			
	0 Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			
	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya			
	Jasa Penunjang Industri Kereta Api			
1	Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya			
1	Industri Sepeda dan Becak			
	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak			
1	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain			
	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya			
1	Industri Jasa Perbaikan dan Peralatan Pesawat Terbang			
	INDUSTRI MARITIM DAN JASA KETEKNIKAN			
35111	35111 Industri Kapal/Perahu			
	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal			
35113 Industri Perbaikan Kapal 35114 Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)				
		35115 Industri Bangunan Lepas Pantai		
1	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olahraga			
	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor			
1	00 Perawatan dan Reparasi Sepeda Motor Di Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi dan Komputer			
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (Engineering)			
	Analisis dan Testing			
	INDUSTRI TELEMATIKA			
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik			
1	Industri Alat Komunikasi			
33203	Industri Kamera Fotografi			
33204	Industri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perlengkapannya			
1	Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)			
	Jasa Konsultasi Piranti Lunak			
1	Pengolahan Data			
	Jasa Kegiatan Database			
1	Reproduksi Media Rekaman Reproduksi Film dan Video			
1	Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer			
	INDUSTRI ELEKTRONIKA			
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, hanya untuk :			
	1). 25206.0103 Komponen Elektronika			
26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul, hanya untuk :			
	1). 26123.01 Sampul Kaca (termasuk Bola dan Tabung) untuk Lampu Listrik, Katup			
	Elektronis dan semacam itu			
	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik			
	Industri Alat-alat Listrik Lainnya untuk Keperluan Rumah Tangga			
29301	Industri Kompor, dan Alat-alat Pemanas, dan Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik			
30001	Industri Mesin Kantor, dan Akuntansi Manual			

KBLI	URAIAN			
No the Company of the	dustri Mesin Kantor, dan Akuntansi Elektrik			
	Industri Mesin Fotokopi			
	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik			
	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)			
	ndustri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet			
to a recommendation of the contract of	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)			
	Industri Komponen Lampu Listrik			
1	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain			
	Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik Lainnya			
	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya			
33112	Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya			
33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik			
33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon			Model Pm-I
Nomor : Lampiran : Perihal : Permin Prinsip	. Ke	pada Yth. pala Dinas I bupaten Acc Lhokseuma	
	Dengan ini kami mengajukan perm penanaman modal, dengan data seb		k mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam t :
2. Ala 3. Jen 4	ma Pemohon/Perusahaan mat Pemohon/Kantor Perusahaan is Industri Rencana Lokasi Pabrik Dalam Kawasan Industri duksi :	:	idak/Belum Ditetapkan *)
<i>3.</i> 110		i Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun
	ai Investasi nlah Tenaga Kerja an : Rekaman NPWP dilampirkan. Rekaman Akte Pendirian Perus	: Laki-	laki:Perempuan:
	Demikianlah, atas bantuan dan per	rsetujuannya	a kami sampaikan terima kasih.
			ma dan tanda tangan Pemohon Asli bermaterai Rp. 6000
TEMBUSAN: 1. Bupati Aceh Utara. 2. Kepala Dinas Perin	dustrian dan Perdagangan Prov. NA)

*) Coret yang tidak perlu

3. Arsip.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh	Perusa	haan
------------	--------	------

Model Pm-II

Nomor Lampiran

Perihal

Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

Per 31 Desember (Melalui//Tanpa Tahap Persetujuan

Prinsip).

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

Lhokseumawe

I. KETERANGAN UMUM	
Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip:	
II. JENIS INDUSTRI	
III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
Pelaksanaan Pembangunan	: %
Fisik Pabrik	
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan	
1. Impor (daftar terlampir)	:%
Dalam Negeri (daftar terlampir)	:%
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	:%
Realisasi Investasi	: Rp (%)
Lain-lain	

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

TEMBUSAN:

1. Bupati Aceh Utara.

Direktur Jenderal

3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD.

4. Arsip.

.....20....

Yang melapor Tanda tangan

Penanggung Jawab

Nama Terang

Jabatan

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-III

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (BARU, HILANG, RUSAK)

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pemohon:		
	a. Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b. Alamat dan Nomor Telepon	:	
2.	Perusahaan:		
	a. Nama Perusahaan	:	
	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
	c. Alamat dan Nomor Telepon	270	
	or reality daily world relepon	:	
3.	Jenis Industri	:	
4.	Nama Notaris dan Nomor Akte Pendirian Perusahaan	:	
5.	Penanggung Jawab Perusahaan	:	
6.	Nama Direksi dan Dewan Komisaris	:	
7.	Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip	:	

7.	a. Lokasi dan luas tanah	Lahan Peruntukan (LPI)
		Di dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
		Di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
		Komplek Industri
		Daerah lainnya
	b. Alamat Pabrikc. Luas Tanah (M2)	
8.	a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahunb. Mesin dan Peralatanc. Bahan Baku dan Bahan Penolong	(Dalam daftar tersendiri)(Dalam daftar tersendiri)(Dalam daftar tersendiri)
9.	Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi : a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi	: Bulan Tahun : Bulan Tahun
	II. NILAI	INVESTASI
1.	Modal Tetap : a. Tanah b. Bangunan c. Mesin/Peralatan d. Dan lain-lain	: Rp
~2.	Modal Kerja: a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan b. Upah c. Dan lain-lain	: Rp
3.	Sumber Pembiayaan : a. Modal Sendiri b. Pinjaman	: Rp

III. TENAGA KERJA

	a. Lab. W Ju Pengg a. Ju	mlah gunaan Tenaga Kerja Asing :	:	orang orang orang orang
	c. Ke	eahlian ngka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:	
		IV. PEMA	SA	RAN
2.	Dalam E k s p Merek		:	(%) (%)
Ca	tatan	: (DILAMPIRKAN) : - Rekaman NPWP - Rekaman Akte Pendirian Perusa - Rekaman Izin Mendirikan Bangu - Rekaman Nama Direksi dan Dew - Rekaman Surat Persetujuan Prin - Rekaman Formulir Model Pm II t Pabrik dan Sarana Produksi (Pro - Rekaman UKL dan UPL atau SPI - Rekaman Izin Lokasi - Rekaman UU Gangguan atau AN	inai van isip ent bye PL	n (IMB) Komisaris o ang Informasi Pembangunan k)
В.	KETEI	RANGAN LAIN :		
	*) 1.	Rusak	:	dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.
	*) 2.	Hilang	:	dilampiri dengan surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI :

		Kapasitas Terpasang/ Tahun	
No.	Komoditi	Tahun	Keterangan
1			
1			
1			
1			
1			
1			
		l	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a.	Mesin/	Peral	atan	Produksi	Impor
----	--------	-------	------	----------	-------

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
						T.D. Juli
	g Impor (C & E) V					

Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

The state of the s	And in contrast of the Party of	The state of the s				
No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
						r.p. Jula

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					Noticiangan
	Impor					
And and the same						

*) Harga Impor (C & F), Kurs	. Rp
------------------------------	------

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Y 0 1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Luas Gudang		1.70
Laus Oddung		
	And the second s	And the state of t

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th.	Satuan
1.	Air		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) G a s 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

^{*)} Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

 b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL*) dari Studi Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL). 	
*) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan	
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lai	sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan n seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk ni bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan
 Bupati Aceh Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD Arsip. 	Nama dan tangan Pemohon, Asli bermeterai Rp. 6000
*) Corat vana tidak parlu	()

Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN (MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP) KE:

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pemohon:		
	a. Nama Pemohon/Kuasa	0	
	1 N P		
	b. Nama Perusahaan	:	
	c. Alamat dan Nomor Telepon	:	
2	Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/		
	Izin Perluasan terdahulu	•	
	II. RENCANA PERLUASAN	VAN	G DIMINTAKAN IZIN
	II. NETONIA I ENEGAGAI		
1.	Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :		
	a. Sebelum perluasan	:	
	b. Sesudah Perluasan	:	
2.	Lokasi dan Luas Tanah:		
	a. Tempat/alamat pabrik	:	
	b. Luas Tanah (M2)	:	
3.	Mesin dan Bahan Baku :		
	a. Mesin dan Peralatan	:	
	b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong	:	
		1000	

4.	Jenis Industri	:	
5.	Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi	bulan	tahun
	a. Mulai pembangunan pabrikb. Mulai pembangunan sarana produksi		tahun tahun tahun
	111.	NILAI INVESTASI	
1.	Modal tetap : a. Tanah	Sebelum Perluasan Rp I	Setelah Perluasan
	b. Bangunan	Rp I	
	c. Mesin/Peralatan	Rp	
*	d. Dan lain-lain	Rp	
3.	 a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan b. Upah c. Dan lain-lain Sumber Pembiayaan : a. Modal sendiri b. Pinjaman 	Rp. Rp. Rp. R Rp. R Rp. R Rp. R V. TENAGA KERJA	p p
1.	Tenaga Kerja Indonesia Laki-laki Wanita Jumlah	Sebelum Perluasan oran oran oran	g : orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila pe a. Jumlah b. Negara Asal c. Keahlian d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:	

V. PEMASARAN

		SEBELUM	PERLUASAN	SETELAH	PERLUASAN
NO.	KOMODITI	Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri				
2.	Ekspor				

1.	Dalam Negeri	***************************************	***************************************					
2. Ekspor								
*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp								
3. Mere	3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :							
B. DAT	B. DATA LAIN							
I. PRO	PRODUKSI SELAMA SETAHUN							
JEN.	PERLUASAN JENIS INDUSTRI : JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN							

No.	Komoditi		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERLATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tuhun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor:					

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs Rp.

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor:					

^{*)} Harga Impor (C&F) Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan :	Luas Gudang Setelah Perluasan	: M2
---------------------------------	-------------------------------	------

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per tahun	Satuan
1.	Air		liter/detik		
2.	Energi Penggerak				
3.	1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1. 2. 3. 4.	Padat Cair Gas Lain-lain			

^{*)} Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak
	Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

1			
ı			
١			
ı			
1			
	*) DVI	Dansana Dansalalaan Linalanaan	

- *) RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TE	MBUSAN:	20			
1.	Bupati Aceh Utara.	Nama dan tangan Pemohon,			
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan	Asli bermeterai			
	Perdagangan Prov. NAD	Rp. 6000			
3.	Arsip.				
*)	Coret yang tidak perlu	()			

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

	Diisi oleh Perusahaan			Model Pm-V
I	Nomor : Lampiran : Perihal : Informasi Industri (Melalui Tahap Perse Prinsip) Selama 6 Bu	etujuan lan.	Kepada Yth. Kepala Dinas Perin Kabupaten Aceh U di Lhokseumawe	ndustrian, Perdagangan dan Koperasi tara
7	Semester : Pertama Fahun : KETERANGAN UMUM : Nama Perusahaan		*	
	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Ind Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Jenis Industri (KBLI)	ustri)	:	
I	II. PRODUKSI NO. KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	(Dalam Juta Rp.) NILAI HARGA JUAL PABRIK (RP.)
ł	Demikian Keterangan ini kam bersedia menerima sanksi sesuai deng	i buat dengan sebe an ketentuan Peratu	narnya, dan apabila te ran Perundang-undanga	rnyata tidak benar, maka kami an yang berlaku.
7	TEMBUSAN:			20
	Bupati Aceh Utara. Direktur Jenderal		Tanda Tangan	:
	3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD		Penanggung Ja	awab :
4	4. Arsip.		Nama Terang	:
			Jabatan	:
*) Coret yang tidak perlu *) Harga jual pabrik			

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi ole	h Perusahaan			Model Pm-VI
Nomor Lampiran Perihal	: : Informasi Industri (Melalui Tahap Pe Prinsip) Selama 1		Kepada Yth. Kepala Dinas Peri Kabupaten Aceh U di Lhokseumawa	
Tahun	:			
I. KETE	RANGAN UMUM:			
Nama Po	erusahaan		:	
	lan Tanggal Izin Usaha I		:	
Name and Address of the Owner, where the Owner, where	Pokok Wajib Pajak (NPW	(P)	:	
Jenis Inc	lustri (KBLI)			
II. PROD	UKSI			(Dalam Juta Rp.)
NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

١				Dalam	Negeri	Im	por	Total	
	No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)
		Bahan Baku Bahan Penolong							

V. PEN	MASARAN					(Dalam)	(-1- D)
			Dalam	Negeri		(Dalam J Ekspor	uta Rp.)
No.	Komoditi	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai	Negara Tujuan
	ursAGA KERJA	. = Rp					
2. Tei	naga Kerja Indones Laki-laki Wanita naga Kerja Asing m l a h	ia	; ;			Orang	
1. Ten - F - F 2. Ga		'AIR SELAMA SI	: :			(KwH)
3. A i 4. Lai			:			(M3))
I. LAN (diis	NGKAH PENGENI i sesxai dengan jen	DALIAN PENCEN is limbah yang dik	MARAN teluarkan serta c	ara limbahnya)		and an execution of the study of an input, year	
	ERUBAHAN PEN <i>A</i> ka ada)	NGGUNG JAWA	AB PERUSAHA	AN			
Ю.	PENANGGUNG J.	AWAB LAMA	PENANGGU	NG JAWAB BA	RU AF	KTE PERUE NOTARI	
	I LIVINGOONG J.	AWAD LAMA	PENANGGO	NG JAWAB BA	RU	NOTARI	S

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN		
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, obersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Peru	ndang-undangan yang	
TEMBUSAN: 1. Bupati Aceh Utara.	Tanda Tangan	:
2. Direktur Jenderal	Penanggung Jawab	;
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD	Nama	Ĭ
4. Arsip.	Jabatan	:

*) Coret yang tidak perlu **) Harga jual pabrik

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUNH 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh	n Pem	ohon			Model Pm-VII				
Nomor : Lampiran : Perihal :		Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabr	ik.	Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopera Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe					
		Dengan ini kan Permintaan Lokasi Pabril			intaan untuk mendapatkan Persetujuan atas perikut:				
		Nama Pemohon/Perusaha	aan	ž.					
		Alamat Pemohon/Kantor	Perusahaan	:					
		Nomor & Tanggal IUI/T	DI	:					
		Jenis Industri		:					
		Lokasi Pabrik:	Baru Lama	:					
		Dalam Kawasan Industri Produksi :		:	Ya/Tidak Belum Ditetapkan *)				
		No. Ko	moditi Industri		Kapasitas Terpasang/Tahun				
		Nilai Investasi Jumlah Tenaga Kerja		:	Rp (

Catatan (dilampirkan):

- Rekaman Izin Usaha Industri/TDI (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman Surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat Keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

	20
 Bupati Aceh Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD. Arsip. 	Nama dan Tanda Tangan Pemohon Asli bermaterai Rp. 6000,00
*) Coret yang tidak perlu	

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi ole	h Pe	mohon			Pdf.I - IK
Nomor	:				
Lampiran Perihal	:	Tanda	Isian Permintaan Daftar Industri Iru, Hilang, Rusak).	Kabupaten di	nas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Aceh Utara
				Lhokse	eumawe
			ETERANGAN PEMOHON Nama	:	
		2.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
			ETERANGAN PERUSAHAAN	INDUSTRI	Ţ.
		1.	a. Nama Perusahaan	:	•••••
		2	b. Alamat dan Nomor Telepon		
			Nomor Pokok Wajib Pajak (NI	?WP) :	
		3.	a. Nama Pemilik	:	••••••
		1	b. Alamat	:	
		4.	Lokasi Pabrik	:	
			a. Desa/Kelurahan	:	***************************************
			b. Kecamatan	•	
			c. Kabupaten/Kotamadya	:	
		-	d. Propinsi	:	
		5.	Bangunan Pabrik		A C'11 C 11 1/C /L 1
			a. Pemilikan	:	(Milik Sendiri/Sewa/Lainnya) *)
			b. Luas	:	- Bangunan : M2
			W 1 1 B 1 B 1 B		- Tanah : M2
		0.	Mesin dan Peralatan Produksi	:	(Dalam daftar tersendiri)
			a. Mesin/Peralatan Utama	•	
			b. Mesin/Peralatan Pembantu	:	
		7	c. Tenaga Penggerak	:	
		7.	a. Jenis Industri	:	
			b. Komoditi	. :	
			c. Kapasitas terpasang per Ta		(D.1. 1.0
			d. Kebutuhan bahan baku/pen	nolong :	(Dalam daftar tersendiri)
		8.	Jumlah Tenaga Kerja		
			a. Indonesia : Laki-laki :	C	orang Wanita : orang
		120	b. Asing : Laki-laki :	C	orang Wanita :orang
		9.		tanah :	Rp)
			dan bangunan tempat usaha		
		10.	Merek *) (milik sendiri/lisensi	l) :	

III. KETERANGAN LAIN

*) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang

telah rusak.

*) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari

Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

	20
TEMBUSAN:	Tanda Tangan atau Cap Jempol
 Bupati Aceh Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD 	Pemohon
3. Arsip	Asli bermaterai Rp. 6000
	()

^{*)} Coret yang tidak perlu

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Pdf..II - IK

KOP UNIT KERJA TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU,HILANG, RUSAK **) NOMOR:

A.	KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN	
1.	a. Nama Perusahaanb. Alamat dan Nomor Telepon	:
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
3.	Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)	:
4.	a. Nama Pemilikb. Alamat Pemilik	:
5.	Jenis Industri (KBLI)	:
6.	Komoditi Industri (KKI)	:
7.	Lokasi Pabrik a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Propinsi	:
8.	Mesin dan Peralatan Produksi a. Mesin/Peralatan Utama b. Mesin/Peralatan Pembantu c. Tenaga Penggerak	: :
9.	Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	: Rp
10.	Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun	:

F	B. KETERANGAN LAIN	
	 *) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah d *) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor : 	
I	Pemegang Tanda Daftar Industri ini akan menyampaikan pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutny	informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK ya.
	Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Indust	ri.
2	TEMBUSAN . Bupati Aceh Utara. 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD. 3. Arsip.	Ditetapkan di : Lhokseumawe Pada tanggal : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
		() NIP

^{**)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh	Don	nucahaan						DIGHT W
Diisi oleii	rei	usanaan						Pdf.III - IK
Nomor Lampiran Perihal	: :		Industri ftar Industri).		Kepada Yth. Kepala Dina Kabupaten A di Lhoks	s Peri Aceh U	Jtara	Perdagangan dan Koperasi
		Tahun:	••••••					
		I. KETE	RANGAN UMUN	M:				
		 Al No 	ama Perusahaan amat Perusahaan omor Pokok Wajib nis Industri (KBLI		NPWP)			
		-	GA KERJA				•	
		NO. 1. 2.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	AGA K	ERJA			JUMLAH
		2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	······································				
		L	Total					
		III. PROD	ot ik si					
		NO.	KOMODITI	Л	JMLAH	SA	ATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.000,-)

11	J	PI	7	M	A	2	A	R	A	N	J

1		Dalam Negeri		Ekspor			
Komoditi	Satuan	Jumlah	Jumlah Nilai Rp.(000)		umlah Nilai (FOB) Ne Rp.(000)**)		
	Komoditi	Komoditi Satuan	Komoditi Satuan Jumlah				

^{*)} Kurs = Rp.

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

		Dalam Negeri		Impor		Total	
Bahan Baku/ Penolong	Satuan	Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai **) Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
Bahan Baku							
Bahan Penolong							
	Penolong Bahan Baku	Penolong Bahan Baku	Bahan Baku/ Satuan Jumlah Penolong Bahan Baku	Bahan Baku/ Satuan Jumlah Nilai Rp.(000) Bahan Baku	Bahan Baku/ Penolong Satuan Jumlah Nilai Rp.(000) Bahan Baku	Bahan Baku/ Penolong Satuan Jumlah Nilai Rp.(000) Jumlah Nilai **) Rp.(000) Bahan Baku	Bahan Baku/ Penolong Satuan Jumlah Nilai Rp.(000) Jumlah Nilai **) Jumlah Rp.(000) Rp.(000)

^{*) (}C&F) Kurs = Rp.

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN	

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan:

TEMBUSAN:

1. Bupati Aceh Utara	***************************************	20).
----------------------	---	----	----

2. Kepala Dinas PERINDAGKOP Prov. NAD Penanggung Jawab/Pemilik

3. Arsip Nama Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh	Pejabat			Model Pi-I
			N, PERDAG URAT UNIT	ANGAN DAN KOPERASI
Nome				Lhokseumawe, 20
Nomor Lampiran	:			
Perihal	: Persetujuar	Prinsip		Kepada Yth.
				di
	pokok sura rencana Sa (KLUI) dan peratur 1. Nama F 2. Nomor	t di atas, dengan ini diber audara untuk mendirikan di daerah berdasa ran pelaksanaannya dengar	itahukan bahv /memperluas rkan Qanun K n perincian sel : (P) :	audara No tanggal perihal va pada prinsipnya kami dapat menyetujui *) usaha industri dalam jenis industri dabupaten Aceh Utara Nomo 4 Tahun 2006 bagai berikut: ii: Wanita:
	No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Per Tahun
	Perusah dan sarana tahun berik Persetujuar Izin Usaha	vestasi sebesar Rp	nenyampaikan 1 (satu) tahu an model Pm- untuk melaku bersangkutan	informasi kemajuan pembangunan pabrik in sekali paling lambat tanggal 31 Januari II seperti terlampir. kan produksi komersial sampai dikeluarkan tanggal
Tembusan: 1. Bupati A 2. Kepala I 3. Arsip	Aceh Utara	DAGKOP Prov. NAD	Kepala Din	as Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
*) Coret yang	tidak perlu			() NIP.

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Pemeriksa

Model Pi-II

KOP DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

ber dar Tal	tanda tangan di ba iten nun ten	wah ini sesuai dengan , serta sesuai der tang Ketentuan dan Ta	surat tugas Nomor ngan Peraturan Bu ata Cara Pemberian I	tahun yang tanggal tanggal Upati Aceh Utara Nomor Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar ksaan setempat terhadap:
	Nama Perusah Lokasi		:	
	Jenis Industri Nomor Pokok		:	
der	Pemeriksa ini ngan hasil sebagai		yaratan untuk memper	roleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*)
1.	Komoditi dan Kap	oasitas Produksi yang d	iizinkan per tahun	
	No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Terpasang
	•••••	***************************************	*****	
	•••••	•••••	• • • • • • •	••••••
2.	Kelengkapan Peri a) Izin Mendirika b) AMDAL, UK c) Merek (milik s d) Lain-lain	an Bangunan, Izin Loka L dan UPL, SPPL	: :	

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (Model Pm-III), Izin Perluasan (Model Pm - IV*) yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Perluasan (Pm.IV*) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

*) Coret yang tidak perlu

	20
Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa
()	()
Kepala Din	Mengetahui : as Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
	() NIP.
TEMBUSAN: 1. Bupati Aceh Utara. 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD. 3. Arsip.	

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model Pi-III

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh petugas DINAS PERINDAGKOP, menyatakan bahwa perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan

Memperhatikan:	Berita Acara Pemeriksaan tanggal	******
	MEMUTUS	KAN
Menetapkan :		
PERTAMA :	Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI Kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk menjalankan Perusahaan Industri	: :
	1. Jenis Industri (KBLI)	·
	2. Lokasi Perusahaan	
	a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik	: :
	3. Jumlah Tenaga Kerja	: Laki-laki :
	dengan ketentuan persyaratan sebagaima	ana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.
KEDUA :	Izin Usaha Industri berlaku selama peru	sahaan industri ini beroperasi.

perundang-undangan lain yang berlaku.

KETIGA

XIV-3

KEEMPAT	:	:	:	:	:	:	Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di :					
		Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara					
		(NIP.					

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

PE	ENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, II	NVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:
	Penanggung jawab:	
	a. Nama	(
	b. Alamat	
	c. Nama Pemilik	
	(Berdasarkan Akte Pendirian)	[
2.	Produksi	•
	a. Komoditi Industri	1
	b. Kapasitas terpasang/tahun	1
3.	Total Investasi	: Rp
4.	Jumlah Tenaga Kerja	:
	a. Indonesia	· · · · · · · · orang
	b. Asing	·orang
5.	Merek *) (milik sendiri/lisensi)	

II. KETENTUAN

I.

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

T	r r	OI	TEN	AB	T.	-
	II	GI	18 2	/A I	N 1 1	٠,
		111	1 1 1	1	N.	

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

	Name and Address of the Owner, where the
Luas GudangM2	

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan
		2		

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

()
NIP		

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model Pi-IIIA

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)*

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Membaca	:	Surat dari
Menimbang	:	 a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang rusak atau hilang *);
		b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
Mengingat	:	 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan

Pemberian Izin Usaha Industri;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:		
PERTAMA	:	Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI * Rusak atau *) hilang Kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk menjalankan Perusahaan Industri	:
		1. Jenis Industri (KBLI)	f
		2. Lokasi Perusahaan	
		a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik	i
		3. Jumlah Tenaga Kerja	: Laki-laki :
		dengan ketentuan persyaratan sebagaima	: Wanita : nna terlampir pada Izin Usaha Industri ini.
KEDUA	:	Izin Usaha Industri berlaku selama perus	sahaan industri ini beroperasi.
KETIGA	ž	Izin Usaha Industri ini terlepas dari izi perundang-undangan yang berlaku.	in-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan-

XV-3

KEEMPAT	:	Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada ta	nggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Pada tanggal	: :
		Kepala Dina	s Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
			()

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I.	PE	NANGGUNG JAWAB PRODUKSI, IN	VESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:
	1.	Penanggung jawab:	
		a. Nama	i
		b. Alamat	:
		c. Nama Pemilik	
		(Berdasarkan Akte Pendirian)	£
	2.	Produksi	
		a. Komoditi Industri	
		 b. Kapasitas terpasang/tahun 	·
	3.	Total Investasi	: Rp
	4.	Jumlah Tenaga Kerja	:
		a. Indonesia	:orang
		b. Asing	:orang
	5.	Merek *) (milik sendiri/lisensi)	z

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penganggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 3 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

1	T	r	CI	In	AN	10
1		983	III	111	AIN	

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

-			marker stable
	Luas Gudang	M2	

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala	Dinas	Perindustrian,	Perdagangan	dan	Koperasi
		Kabupaten A	Aceh Utara		

()
NIP.	

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model Pi - IV

KOP SURAT UNIT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR

TENTANG IZIN PERLUASAN (MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

Membaca surat permintaan dari Permintaan Izin Perluasan, maka berdasar Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor	kan Qanun Kabupate	n Aceh Utara	Nomor 4 Tahu	
	IZIN PERLUASAN			
Kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk menjalankan Perusahaan Industri 1. Jenis Industri (KBLI) 2. Lokasi Perusahaan a. Alamat Perusahaan b. Alamat Pabrik dengan ketentuan dan persyaratan sebagaim Izin Perluasan ini merupakan bagian yang berlaku selama perusahaan industri ini berp	g tidak terpisahkan d			dimiliki dan
	Ditetapkan di pada tanggal			
	Kepala Dinas	Perindustrian, F Kabupaten A	Perdagangan dar ceh Utara	ı Koperasi
	1	NIP.)	
<u>TEMBUSAN</u> :				
1. Bupati Aceh Utara.				
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.				
3. Arsip.				
*) Coret yang tidak perlu				

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I.	PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG: 1. Produksi :				
	a. Industri (KKI)	:			
	b. Kapasitas Izin Per Tahun	4			
	Total Investasi : a. Modal Mesin Peralatan b. Modal Kerja	:			
	Jumlah Tenaga Kerja a. Indonesia	: orang			
	b. Asing4. Merek *) (milik sendiri/lisensi)	orang			
	T. IVICION / (HIMIN SCHOOLS)				

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

I C 1	
Luas Culdano	,我们就是我们的一个人,我们就没有一个人的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就会会会会会会会会会会会。""我们我们的,我们就是我们的,我们就
Zaus Gudung	MO
Luas Gudang	······································

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

> Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

u .	
)
NIP.	

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model Pi - V

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOP SURAT UNIT

Nomor Lampiran Perilah	: Persetujuan atas Permintaan Perusahaan	Kepada Yth. di
	Sehubungan dengan permintaan Sauda tanggal perihal Permintaan Peru ini kami memberikan persetujuan atas perubahan: Lama 1	ibahan dengar Baru
	2 3	
	Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksu tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Ir Nama	d di atas, adalah merupakan bagian yang
	Kepala Dinas Pe	erindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
	(N	<u>)</u>

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model Pi - VI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOP SURAT UNIT

Nomor Lampiran Perihal	: :	Penundaan/Penolakan *) permintaan Persetujuan Prinsip/ Izin Usaha Industri *) (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)	Kepada Yth.			
		Usaha Industri *) diperoleh hal-hal sebagai berikut: 1. 2. , dan seterusnya	Nomortanggal setelah ri/lokasi proyek/persyaratan Persetujuan Prinsip/Izin			
		Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk diberikan. Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) ditolak. Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannxa Surat Penolakan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan banding. Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.				
		Kepala Dinas I	Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara			
		<u>(</u>	NIP.			

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VII

Onit Ke	a	
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOP SURAT UNIT
Nomor Lampiran Perihal	To Iz To	guran ke
	je pe	Sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industron dan dan dan dan dan dalah dalah dalah dis Industri
		Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta agar Saudara dalam jangktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yadaku dan melaporkannya kepada kami. Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.
		Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
		() NIP.

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Model Pi -VIII

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang	:	bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor
		di

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1986 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
 - Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
 - Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian xan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

Memperhatikan	: 1.	Surat dari					
	2.	Surattanggal					

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

: Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalan jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industrinya*) akan dicabut.

KETIGA	: Dengan dibekukannya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatar dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di :
	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
And arrangement of a second state of the second	()

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model Pi - IX

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang	: bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor Tanggal
Mengingat	: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
	 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

- 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1986 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

XXI-2

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo.
 No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian xan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

Memperhatikan	:	Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara tanggal
		2. Surat Nomor tanggal Perihal
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	•	
PERTAMA	•	Mencabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri*) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara No tanggal yang bergerak dalam jenis industri di
KEDUA	:	Kepada perusahaan yang dicabut Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *)

ini dapat mengajukan banding.

KETIGA	: Dengan dicabutnya IzinUsaha Industri/Tanda Daftar Industri*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri dan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri*) tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di :
	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
	() NIP.

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - X

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

		KABUPATEN ACEH		A	10.101	
Nomor Lampiran	:	KOP SURAT U	NII	************	2	20
Perihal	:	Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik			as Perindustrian, labupaten Aceh U	
		Lokasi Pabrik :	mintaan	Persetujuar juan atas pem		Lokasi Pabrik sebagai berikut: aru
		Persetujuan pemindahan lokasi pabrik in berlakunya pada tanggal Perusahaan Saudara diwajibkan menyampai produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) berikutnya dengan menggunakan Pm - II seperti te	ikan info tahun	rmasi kemaju	an pembangunan	pabrik dan sarana
		Кера	ala Dinas		n, Perdagangan da 1 Aceh Utara	an Koperasi
			!	NIP.)	

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Pdf.II - IK

KOP UNIT KERJA TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU, HILANG, RUSAK **) NOMOR :

A.	KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN	
1.	a. Nama Perusahaanb. Alamat dan Nomor Telepon	: :
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
3.	Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)	
4.	a. Nama Pemilikb. Alamat Pemilik	:
5.	Jenis Industri (KBLI)	:
6.	Komoditi Industri (KKI)	:
7.	Lokasi Pabrik a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kotamadya d. Propinsi	
8.	Mesin dan Peralatan Produksi a. Mesin/Peralatan Utama b. Mesin/Peralatan Pembantu c. Tenaga Penggerak	:: :: :
9.	Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	: Rp
10.	Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun	:

XXIII-2

x. KETERANGAN LAIN:
**) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki. **) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor:
Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-II pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
() NIP.

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

-			
	Diisi oleh Pemohon	Model SP I	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini	:
Nama Penanggung Jawab/Kuasa	:
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa	:
Nama Perusahaan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Alamat Kantor Pusat/Perusahaan	:
Alamat Pabrik/Lokasi *)Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat	:
Nomor Telp/Fax/Telex	:
Jenis Industri	:
KBLI/KKI	:
Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Izin	u Usaha Industri Nomor:

- Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
- Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambatlambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri).

- 4. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - *) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :
 - a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri.
 - Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian	Surat	Pernyataan	ini	kami	buat	dengan	sesungguhnya	untuk	dapat
dipergunak	an seba	ngaimana mes	tinya	ì.					

20
Yang membuat pernyataan,
() Direktur/Penanggung Jawab

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Arsip.

Catatan:

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan (dibubuhi materai Rp. 6.000,-).
- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan Izin Usaha Industri.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pei	monon:		
	a.	Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
2.	Per	rusahaan :		
	a.	Nama Perusahaan	:	
	b.	No. Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
	c.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
				••••••
3.	Jen	is Industri	:	
4.		ma Notaris dan Nomor Akte ndirian Perusahaan	:	
	I CI	idiriali Ferusaliaali		***************************************
				••••••
5.	Per	nanggung Jawab Perusahaan	:	
6.	Na	ma Direksi dan Dewan Komisaris	:	

XXV-2

7.	a.	Lokasi dan luas tanah			Lahan Peruntukan Industri (LPI)
					Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat Kompleks Industri
					Daerah lainnya
	b.	Alamat Pabrik	:		
	C.	Luas tanah (M2)	:		
8.	a.	Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun	:	(Dalam	daftar tersendiri)
		Mesin dan Peralatan Bahan Baku dan Bahan Penolo	: ng:		daftar tersendiri) daftar tersendiri)
9.	Pa	dwal waktu penyelesaian pembar brik dan Sarana Produksi : Penyelesaian Pembangunan	nguna	an	
		Pabrik		Bulan.	Tahun
	b.	Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi	;	Bulan .	Tahun
		II. NI	LAI	INVEST	ASI
1.	Me	odal Tetap :			
	a.	Tanah		Rp	
	b.	Bangunan	:	Rp	
		Mesin/Peralatan	:	Rp	
	d.	Dan lain - lain	*	Rp	
2.	Mo	odal Kerja :			
	a.	Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	1	Rp	
	b.	Upah	:	Rp	
		Dan lain - lain	:		
3.	Su	mber Pembiayaan:			
		Modal Sendiri		Rp	
	b.	Pinjaman	1		

XXV-3

III. TENAGA KERJA

1.	Per	nggunaan Tenaga Kerja Indo	nesia:	
	a.	Laki-laki	*	orang
	b.	Wanita		orang
		Jumlah	:	orang
2.	Pe	nggunaan Tenaga Kerja Asir	ng:	
	a.	Jumlah	<u></u>	orang
	b.	Negara asal	:	
	c.	Keahlian	1	
	d.	Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	1	
			IV. PEM	IASARAN
1.	Da	alam Negeri	:	(%)
2.	E	k s p o r	1	(%)
3.		atatan (Dilampirkan) : -	Rekamar Rekamar Perusaha Rekamar Rekamar	Akte Pendirian Perusahaan dan atau
В.	KI	ETERANGAN LAIN:		
	*)	 Rusak Hilang 		dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

0	T	AT	' A	T	A	INI
C	1)	AI	A	٠,	A	IN

T	TOTO	OTT	IKS	Y
	PK	6 31 31	K	. 1

IENIS	INDUST	RI								
TITIO	IIIDODI	1/1	 							

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/Tahun	Keterangan
			,

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M2

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Jiter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listerik - PLN - Pembangkit sendiri		KVA KVA		KwH KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spxsifikasi Limbah yang dixeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah*)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

^{*)} Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

 b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.
*) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20
Nama dan tanda tangan Pemohon,
Asli bermaterai Rp. 6000,
1. Bupati Aceh Utara. 2. Arsip.
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN (TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1.	Pe	mohon:		
	a.	Nama Pemohon/Kuasa	:	
	b.	Nama Perusahaan	:	
	b.	Alamat dan Nomor Telepon	:	
2.		omor dan Tanggal Izin Usaha dustri/Izin Perluasan terdahulu	:	
		II RENCANA PERLUA	SAN	N YANG DIMINTAKAN IZIN
1.		pasitas yang direncanakan untuk rluasan:		
	a. b.	Sebelum perluasan Sesudah perluasan	:	
2.	Lo	kasi dan Luas Tanah :		
	a. b.	Tempat/Alamat Pabrik Luas Tanah (M2)	:	
3.	Mo	esin dan Bahan Baku :		
		Mesin Peralatan Kebutuhan Bahan Baku/ Penolong	:	
4.	Jer	nis Industri	:	

5.	Jadwal waktu penyelesaian pem- bangunan pabrik dan sarana produk		bulan	tahun
	a. Mulai pembangunan pabrikb. Mulai pembangunan sarana produksi			
	III. NI	LAI	INVESTASI	
1	Modal Tetap :	Seb	elum Perluasan	Sesudah Perluasan
1.	a. Tanah b. Bangunan c. Mesin/Peralatan d. Dan lain - lain	Rp. Rp.		Rp
3.	Modal Kerja: a. Bahan Baku untuk 4 (empat): bulan b. Upah c. Dan lain - lain :	Rp.		Rp
3.	Sumber Pembiayaan: a. Modal Sendiri b. Pinjaman			Rp
	IV. T	ENA	GA KERJA	
1.	A-40 10		orang	Sesudah Perluasan orang orang orang
2.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing: (bila perlu dalam daftar tersendiri) a. Jumlah b. Negara asal c. Keahlian d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:		

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBE PERLU		SETELAH PERLUASAN		
		Volume	Nilai *)	Volume	Nilai *)	
1.	Dalam Negeri Ekspor					

Accepted	*) FOB. Kurs US\$ = Rp
3.	Merek *) (milik sendiri/lisensi) :
	VI. DATA LAIN
I.	PRODUKSI SELAMA SETAHUN
	PERLUASAN JENIS INDUSTRI: JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

	Kom	oditi	the same of the sa			
No.	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Satuan	Keterangan
	Perluasan	Perluasan	Perluasan	Perluasan		
	1		}	\		1
				}		<i>{</i>
	1		}		ı	1
	1		I	1	1	1

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :		орезницы	Turin		
	Impor :					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri : Impor :					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
-	Spesifikasi	de de company hanne his ser me altre en ser me	-	Asai	кр. зига	
	Dalam Negeri:					
	Impor :					

^{*)} Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

IV.	GUDANG UNTUK BAHAN I	BAKU DAN HASIL	PRODUKSI SETEL	AH PERLUASAN

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1. 2.	Air Energi Penggerak		Liter/detik		Liter
Annual province and the contract of the contra	1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

20
Nama dan tanda tangan Pemohon,
Asli bermaterai
Rp. 6000
()

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Arsip.

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh	Perusal	haan				Model SP IV
Nomor : Lampiran : Perihal :	(Tanpa	nasi Industri a Melalui Tahap ujuan Prinsip)		Kabupaten di –	h. nas PERINDA Aceh Utara kseumawe	AGKOP
	Semes Tahun					
	I.	KETERANGAN	N UMUN	<i>M</i> :		
	Nom Nom	a Perusahaan or dan Tanggal Izir or Pokok Wajib Pa Industri (KBLI)	n Usaha jak (NP	: Industri : WP) :		
	II. PR	RODUKSI				(dalam Juta Rp.)
	No.	Komoditi	KKI	Jumlah	Satuan	Nilai Harga Jual Pabrik (Rp.)
		Demikian ketera ta tidak benar, l uan Peraturan Peru	kami be	ersedia me	nerima sank	narnya, dan apabila ssi sesuai dengan
Tembusan: 1. Bupati A 2. Kepala D 3 Arsip.		ra RINDAG Prov. NAI	D		Tanda Tangar Penanggung J Nama Terang	awab:

Jabatan

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

(Dalam Juta Rp.)

NILAI (Rp.) **)

Diisi oleh	Perusahaan	Model SP V
Nomor : Lampiran : Perihal :	Informasi Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)	Kepada Yth. Kepala Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Aceh Utara di - Lhokseumawe
	Tahun :	
	I. KETERANGAN UMUM :	
	i. KETEKANGAN UMUM :	
	Nama Perusahaan	
	Nama Perusahaan	: dustri/Izin Perluasan :

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

KKI

KOMODITI

	Bahan Baku/		Dalam	Negeri	Ιm	por	To	tal
No.	Bahan Penolong	Satuan	Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai C&F (Rp.)	Jml	Nilai (Rp.)
								,

JUMLAH

SATUAN

NO.

^{*)} Coret yang tidak perlu **) Harga jual pabrik

XXVIII-2

	T	Т	Dalam	Nagari	()	Dalam Juta	Market State of the Contract o
No.	Komoditi	Satuan	Jml	Negeri Nilai (Rp.)	Jml	Ekspor Nilai (FOB)*) (Rp.)	Negara Tujuan
) Ku	ırs	= Rp				anno medi pud an ecolo li limente gringi peral	
V. TE	ENAGA KERJA						
	Tenaga Kerja - Laki-laki - Wanita Tenaga Kerja Jumlah		: .				orang orang
/I. P	EMAKAIAN E	NERGI/A	IR SEL	AMA SE	TAHUN	J	
1.	Tenaga Listrik - Pembangkit - PLN Gas		: .			(KwH) mmcf)
3.	Air Lain-lain		: .				

11			
1			

por el monte com como colonio de la colonio	serk durint	1.1					
	te commission of the	and the second s	1 115:15:4	11.63.64 11.63.64 11.63.64	9 12 15 16 16 16 17 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	process of the decision of the	of a second constant
171.355.2		1-11	Fig. 1	i isii	l market	. Wishers of	1
	(1/4/19)		i custo				
				1			
2 4 6 41 50 4 4 5 6 7 6 4 6 6 1	An an electrical constant	to mark statement	ta aray strans estantists b	See a recommen	interpolation and a	Anna mana mana mana mana mana m	a arma avava A
							1
a province there is apo	the series are series	i Barrier Carren	7 (1) FR + 4 (F to 1) 4 (1 + 2) (4	Market and the second second	final met annual enter	Karan muzema arangun managu	
					្នុក្ខ៖		
						AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
THE D					MARONON.	Tantas Keye t Lakishki Madashki	1
.Signe					11.75	AND I PRES	<i>y.</i>
						Asi wa	
(1402) (410) (310) (10) (10)					TLEXT's	Jimes I special Templements 21,19 22,0 10,0	
						reni Hibis	**
Enr. en	Z. woxers					rend riind 	e in
Enr. 67	ik woznac					om na acola. De enemento	e in
Birth Bil	Z. nograj				i majiro	om na acola. De enemento) I:W

XXVIII-3

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN (jika ada)

No.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS
IX. MA	SALAH YANG DIH	ADAPI DAN SARAN	-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan	
Temousan	

1. Bupati Aceh Utara

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD

3 Arsip.

Tanda Tangan

Penanggung Jawab:

Nama Terang :

Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

7.37.77.7

AN ARTH THE STATE OF THE STATE

ALERT ALE HILLS	Figure William Zalu		
AND ALL MANAGEMENT		AND DESCRIPTION	
75/5.18.7	IMPERIOR.	greaters and a great management and an artist and a second and a	governor accompany
e contrate the management of the first term of the second			
		-	1
	The second secon	Contractor to the Contractor of the Contractor o	
			1.5
77 Blo	ALSO DAN SWESS	BOOLDAFY HY JAK	12 /3
77 BW	SALDVIR KARQIDICAN	THE DARK HY LAK	. 16 . 16
77 330	SALTA RESERVE AND SALES	THE DARK HATE	
77 330	SALTA REMANDING TO	TOO DARY HY 12 k	. 12. AS
77 330	SALTA RESERVE OF THE SALES	THE DARY HY LAK	
77 330	SALTA RESPONSAN	THE DARY HY LAK	
77 330	- ALBV R KARQIBLAR	THE DARY HY LAK	
77 330	SALTVE KARIJISLIN	THE DARY HY LAK	
77 330	SALTVE KARLIDEAK	THE DARY HY LAK	
77 330	SALTA RIKA UJUSTA	IERO DZEV HZ ASK	

i kuninga, katakengan ini kuna buri danapa kangan katanga dan dan dan dan dan dan katakin tarapaki sebak banda bandi berkatia menarana sadik kataki katagan la buman Parassan Perassanah pendangan dan katangan kata berkata

> Sastanan Bayasa Saula Laura Kapasa Sana Williah DAG Itan 25 MB Bayasa

g f san en 1 " ellasell elinead rejna pajaneral i greme financial elinead

shipe lifertyrajana ta'

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model SP VI

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR:

TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI (TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Membaca	:	Surat dariNomortanggalperihal
Menimbang	:	 a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha Industri; b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan

- Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
- 5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
- 6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

LAMPER VN XXIX PERABURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : FTAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model SP VI

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN MUPALA DINAS PURINDUSTRIAN. PERDAGANGAN DAN KOPERÁSI KABUPATEN ACEB UTARA MOMOR :

TENTANG (ZIN USAHA INDUSTRI (LANPA MILALUI TAHAC PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

dentinga	Sura dari
snedminol/	: a, behrva berdasarkan penifaian dan penelitian terhadan realisasi pe bangunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan indu
	yang dipertukan bagi industri tersebut untuk mendepatkan Izin Us Industri:
Mengingar	behwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri. L Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Perangan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenang
	Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri: 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Us

- L. Kupunisan Presiden. Rt Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Peraberian tala Usaha Industria
- Surat Kerpunsan Menteri Perindustrian Nomer: 250/M/SK/10/1994 terdang Pedoman Tekais Penyusunan Penyendahan Dampak Leokurean Hidum nada Sekura Industri:
- 6. Surat Kepuhusan Mentari Parindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995 ter ung Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Se in Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secura Berlebihan;

XXIX-2

- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 444/MPP/ Kep/9/1998 jo. Nomor: 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 394/MPP/ Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 589/MPP/ Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 590/MPP/ Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:			
PERTAMA:	Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI		
	Kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Untuk menjalankan Perusahaan Industri 1. Jenis Industri (KBLI) 2. Lokasi Perusahaan a. Alamat Perusahaan	:	
	b. Alamat Pabrik	:	
	dengan ketentuan dan persyaratan sebag Industri ini.	aiı	nana terlampir pada Izin Usaha
KEDUA :	Izin Usaha Industri ini berlaku selama kecuali apabila dalam jangka waktu tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak m dan sarana produksi serta tidak memerdalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Indu	4 ere	(empat) tahun terhitung mulai calisasikan pembangunan pabrik ni kesanggupan yang tercantum

1.0100

- 1. M. parguera Mandary Paringhananas dan Perdapan casi is masa 2.4.4 NOPsi principal programmer (1) NOP-Rope 1, 200 mengari Papanesas and 1 and Kara Recommend Overdamental dana basing menanca.
- PSAAM source or respected to be increased as it interest near more as a security around some executions of execution of executions are respected to the respect to the resp
- And the state of the contract the first state of the stat
- [54] A. M. Barwel on anyone of independent property of the Venezumon Model in Nov. 1 and Control of a stability of interpretable property of party of property of the Control of the Co
- fine it and apparent hold, made I is established to an array process and applied success and a Company of the Company of the control of the c
- general and seed for the seed of the seed

taur suputii *

TATAL AND A PERSON PORT OF MANAGEMENT AND A STATE OF STAT

ne proposition of the state of

- t seed armspelanden Papa administration
- and Wishelman and Alleman and
- colora Parentesa a Visita Carolinas
- and the second of the second o

podja i korjanica o Jose ponjenaraz sebogornana irrituaje: pa je kom je eko jede te sin

stre propund des relegios remplemento antegio della politica expetitat sulle e li grali (100 della).

Relegio per referet mode i propundo di proper della propundo della pr

XXIX-3

KEHGA		Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
KEEMPAT	;	Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
KELIMA	:	Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di :
		Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
		NIP.

<u>TEMBUSAN</u>:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

6-7477

inde Lighte Federal for many disput molecular value of the capturation of the Commission of the Commis	
ામને મામ મોજની ત્યારેકામ મોલા દુકાનું વાજો મોડા અનો સામકો મામે દેવામાં પ્રાથમિક દેવામાં મેળ છે. જના કાર્યો કૃતાલાલો મામ દુકાનો કાર્યો માને મહાનું સામે કર્યો કર્યો માને મામ કુલા હોલા મુખ્ય કર્યો હતા.	TATILLER
nadquisal-laggini abaha bahda interpolati katuptah lastuquid	ARTHA
in nednervici	
neb (แต่อะมูเดียวรับ แต่เกล่ะเกิดสายรับ ของนั้น และกุรวับ สายสนา (bo/- เกล่ะเคล่าสายสายสมั	
	process of the workship

ALA BRATE

aner S. As. A. Smalleri

SVAC and the definite sent temperal f

A. 10 1/2 1

ad road delact erray mare but

XXIX-4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I.	PENANGGUNG JAWAB,	PRODUKSI,	INVESTASI,	TENAGA	KERJA	DAN
	MEREK DAGANG:					

l.	Penanggung Jawab:		
	a. Nama	1	
	b. Alamat	:	***************************************
	c. Nama Pemilik	:	
	(Berdasarkan Akte Pendirian)		
2.	Produksi:		
	a. Komoditi Industri		***************************************
	b. Kapasitas Terpasang Pertahun	÷	
3.	Total Investasi		
4.	Jumlah Tenaga Kerja:		
	a. Indonesia	;	orang
	b. Asing		orang
	IF(I)		

II. KETENTUAN:

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

TAMPINEN ASPERTANTALIAN SEPERTINAN PERMANAN

主発で2000年3月	EHER ENISE JUL	TO WITH A L	7775 75 27 715

	i disani, granggasusti	
	Greg Z. S.	
	tematic e	
	Albred Berndik	
	(fundament Mac Pendaman)	
	teristrer"	P' 1
	a beginning bulances.	
	h. Karrashas Terpasang Pertahun	
	Ford investor	
291876	secución) a	
ģravio	gang/ d	
	: XX JAV:SH	121
40 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		

- Setten pendidhan terhadan lokesi maopun jesis urdusa sajab mendapetkan

	AT T	** * *	TO
111	(21)	1111	11
III	(11)	DAN	l V

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang
berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan,
perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan
usaha industri.

 M2
:

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

> Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

()
NIP.	

gad combete grad	because that training	statisher na	fra en es.	had specifical
Addition designs	1904, Satar redacaya	garagi dellari	naha i Assayini	ed of the street
Sandard Canal Mark	James be garded or	i grabatiza and	ter in the treat.	ei de pai anzlorg
				the solder referen

		Personal control of the second control of the second		
			officer been	

Was we were decreased by

Phu(82)	sementral reference	1 142	Milwette, i	
电动脉 医硫磺胺二甲烷甲二二甲烷 计原序 网络红斑麻醉医白红) milionii			
			CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE ACTION OF THE ACTION OF	The second
		į į		
ران بعدورو در رفاد بدود دای بهاید اما را دادا برای داد				1

Applicht vorst inne metrichtet in terschet de sins telle einschlieben Phiese den Lieder Conser un stepst ehlbereken senket beerdeering sossetten Phiese den Chenne Kahrenout sould inna Nement Schul 1998 Paranne Pakakanangen

Eugente (Figure Parkedhermann Fan ar mig an dum Koppans) Kadenharm Frank Chaten



LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Model SP VIA

KOP SURAT UNIT **KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR:

TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (RUSAK/HILANG)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Membaca	:	Surat dariNomortanggalperihal
Menimbang	•	 a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas serta bukti-bukti yang ada kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang * Rusak/Hilang; b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian:

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri:
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
- 5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
- 6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan:
- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 444/MPP/ Kep/9/1998 jo. Nomor: 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Model SP VIA

The Table 1

A DE LE COMPANY DE LE CONTRACTOR EN LA COMPANY DE LA COMPA

(Are a 7.26) 1

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

THE ASSESSMENT OF STREET AND AND AND ASSESSMENT OF STREET

and the second of the second o

allo grass "Liestable" — a case in restance research share to the second second

the standard medium second from the Spine and the

"are white the problems were and are partially the many for an experience."
 "are a superior of the problems of the partial of the

edaz lativi y neu 1903 and, i 24 - 25 daminen e ang.

in an Supermann Meaner, "Schulustmen North Countries Pannach for the Consumer of the Countries of the Countr

and Leptonian Memori be industing twee 11 USA-7 1995

The wave region forth day beamwile adult Vanu Preses

The Color of the Memory American of the tweethers

And the five principles of the control of the state of th

XXX-2

- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 394/MPP/ Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 589/MPP/ Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 590/MPP/ Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:		
PERTAMA:	Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI	baru dengan alasan *) rusak/hilang
	Kepada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
	Untuk menjalankan Perusahaan Industri	;
	 Jenis Industri (KBLI) Lokasi Perusahaan 	·
	a. Alamat Perusahaan	Ī
	b. Alamat Pabrik	:
	dengan ketentuan dan persyaratan sebag Industri ini.	aimana terlampir pada Izin Usaha
KEDUA :	Izin Usaha Industri ini berlaku selama kecuali apabila dalam jangka waktu tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak me dan sarana produksi serta tidak memer dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Indu	4 (empat) tahun terhitung mulai erealisasikan pembangunan pabrik nuhi kesanggupan yang tercantum
KETIGA :	Izin Usaha Industri ini merupakan ba Surat Pernyataan tertanggal bersangkutan.	

1.75

- The Transport of Contract Published and analysis of the Contract of Contract of the Contract o
- * Managara Seria Bertani Bertantan dan Mandapangan Managara Managa
- 37. M. Serrassen, V.S. erser, Planforderseiter, den Perdiagrappus Niverbert, Schelbeller M. Serrassen, in Schelbeller, Physiologische Vertrangen dem Frank Partie Planforder Vertrangen dem Frank Datien Georgeen.
- 11 Special Republic Community of Characteristics of Community Community (No. 1) (1974) and Characteristics of Characteristic
- 2. Portuguir Bapari Auch Chara Normer Recordings due Turn Perricona Irla Carlo Bahada VIII Carlo Dathar Industria CDA character and an engage.

MARKITIMEN

		aukinteriolis
milid sheam i s mende cagnub mu il	MERNIKE PRAKTANI oplowiacić	FREETALA
	हासक्यात तमाराज्यात सम्बंधित के संबंधित है हो हो है है सम्बंधित एक क्याचे	
	interfacil mandazorus emskrytkirom. Jessy's	
	i jaris imi gaspilsisti is Listasi Pennsatitan a. Vanat Pennshinas	
	*PERRINGFOLD TREATED.F AD	
	Anedi kawait di	

- Lescapped an emploi semanner, mucho addresd in medici admit air () / // miarq gennident medic (11/2-01)) mikos migrag undab addrest vianosi Zertun pomenericam ancie milione religio mucho moder mast bank frages
- onger it binet. Portgation dibusi indebererenbie ekon geminngssen militäk skat somme produksi setta tilbir istemioriski komungsspan jang teromanni disset somet Rom brane trunk kalan tidakar massi dangan sendingga
- SELTULE tida i kaba tebahan nu mwapakan begina yang dibik repakabkan dari banke Pengentan nukanggalyang dibiga erok parakabana yang terangkalan

XXX-3

KEEMPA1	peraturan perundang-undanga	, ,	dinaruskan berdasarkan
KEEMPAT :	Izin Usaha Industri ini mulai	berlaku pada tanggal	ditetapkan.
			:
			dustrian, Perdagangan dan bupaten Aceh Utara
		(NIP	

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Aceh Utara.
- $2.\ Kepala\ Dinas\ PERINDAG\ Prov.\ NAD.$
- 3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu.

 1.1 • 1.27 • 4 — 1.20 • 1.45 there exign the hype-way was deep gamp discount on bashmadeen payments permute permute open survey of securities.

maken stricken och store militard aben oprins, bet 146. Ame. 1.757.738

th and order of the following of the fol

Superior Described Services Producing a discrete superior discr

1.77

4 8 8 8 8 7 13

man I don't display to

W.Z. sanding diversity season and as it

1.00

at the desired and are a figure to the

XXX-4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I.	PENANGGUNG JAWAB,	PRODUKSI,	INVESTASI,	TENAGA	KERJA	DAN
	MEREK DAGANG:					

1.	Penanggung Jawab:		
	a. Nama	:	
	b. Alamat	:	
	c. Nama Pemilik	:	
	(Berdasarkan Akte Pendirian		
2.	Produksi:		
	a. Komoditi Industri	1	
	b. Kapasitas Terpasang Pertahun		
3.	Total Investasi	:	
4.	Jumlah Tenaga Kerja:		
	a. Indonesia	:	orang
	b. Asing		orang
5.	Merek *) (milik sendiri/lisensi)	10.00	

II. KETENTUAN:

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juni dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
- Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6.	Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
III. G	UDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	1	M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindust Koperasi Kabupa	
2	×

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja				Model SP VII
		RAT UNIT		
KEPALA DINAS PERI		TUSAN PERDAGAI	NGAN DAN I	CODED VCI
	ABUPATEN			KOI EKASI
	OMOR :			
		ΓANG		
T42704.2477		LUASAN		
TANPA MEL	ALUI IAHAI	PPERSETUJ	UAN PRINSI	P
Membaca surat tanggal berdasarkan Qanun Kabupata Aceh Utara Nomor	en Aceh Utara	perihal Peri Nomor 4 Ta	hun 2006 dan	Perluasan, maka
	IZIN PER	LUASAN		
Kepada				
Nomor Pokok Wajib Pajak (N				
Untuk manialankan namusahaa	n industri .			
Untuk menjalankan perusahaan 1. Jenis Industri (KBLI)	n industri :			
2. Lokasi Perusahaan				
a. Alamat Kantor	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
b. Alamat Pabrik				•••••
Dengan ketentuan dan persyar Izin Perluasan ini merupakan b dimiliki dan berlaku selama pe	pagian yang tid	lak terpisaĥka	ın dari Izin Us	aha Industri yang
diffiliki dali beriaku sefama pe	rusanaan muu	isuri iiii berope	crasi.	
***************************************		D:	4-411:	
			tetapkan di : da tanggal :	
		Kepala Di		n, Perdagangan dan Koperasi n Aceh Utara
)
			NIP.	
<u>TEMBUSAN</u> :				
1. Bupati Aceh Utara.				
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. N	NAD.			
3. Arsip.				
*) Coret yang tidak perlu.				
, corot jung trauk periu.				

XXXI-2

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

ĺ.	PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA	KERJA DAN MEREK DAGANG:
	Produksi : a. Komoditi Industri (KKI) b. Kapasitas Terpasang Pertahun	:
	Total Investasi a. Modal Mesin Peralatan b. Modal Kerja	: Rp
	3. Jumlah Tenaga Kerja :a. Indonesiab. Asing	: orang : orang
	4. Merek *) (milik sendiri/lisensi)	

II. KETENTUAN:

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

TT		MY	TT	4 7	. T	~
11	1	(÷1	ID	AT	VII	
11			111		N.	١ı

Izin	Usaha	Industri	ini	berlaku	pula	bagi	gudang	atau	tempat	penyimpanan	yang
bera	da dalai	m kompl	ek ı	isaha ind	ustri	yang	digunaka	ın unt	tuk peny	rimpanan peral	latan,
perle	engkapa	an bahan	bak	u, bahan	peno	long	dan bara	ng ja	di untuk	keperluan keg	iatan
usah	a indus	tri.									

Luas Gudang	f	M2	
-------------	---	----	--

IV. RINCIAN PRODUKSI

Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan
	Komoditi	Komoditi KKI	Komoditi KKI Kapasitas Terpasang Pertahun

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

)
NIP	

LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NIP.

NOMOR: 1 TAHUN 2007 TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

	Diisi oleh Pejabat Unit Kerja		Model SP VIII
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAC KOP SURAT I		
Nomor Lampira	:	2	0
Perihal	: Penundaan/Penolakan *) k Permintaan Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui d	Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Pe lan Koperasi Kab. Aceh Utara li Lhokseumawe	rdagangan
	Sehubungan dengan Tanggal setelah diad komoditi industri/lokasi poyek/ko berkaitan dengan persyaratan Izin U berikut: 1. 2. 3. 4.	dakan penelitian terhadap j elengkapan Surat Pernyata	Perihal ienis dan an yang
	bahwa permintaan Izin Usaha In ditolak *) untuk diberikan. Bagi Perusahaan Industri	yang ditunda pemberian Iz	ditunda/ in Usaha
	Industri diberikan kesepakatan unt Surat Pernyataan yang berkaitan d dalam waktu 14 (empat belas) har Penundaan dan apabila batas wak Usaha Industri ditolak. Sekian, untuk menjadi perhat	uk melengkapi/memenuhi kel engan persyaratan Izin Usah i terhitung sejak dikeluarkan tu tersebut dilampaui permir	lengkapan a Industri nya Surat
Tembusan:	Aceh Utara	Kepala Dinas Perindustrian, Per	dagangan dan Koperasi
 Kepala Arsip 	Dinas PERINDAG Prov. NAD	Kabupaten Ac	0 0 1

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN X XXIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1TAHUN 2007 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja	Model SP IX
DINAS PERINDUSTRIAN, PERI	
Nomor : Lampiran : Perihal : Penundaan/Penolakan *) Permintaan Tanda Daftar Industri Sehubungan dengan p Tanggal	Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Aceh Utara. di - Lhokseumawe ermintaan Saudara Nomor Perihal an penelitian terhadap jenis dan
1. 2. 3. 4. Sehubungan hal-hal tersebut di bahwa permintaan Tanda Daftar Indus ditolak *) untuk diberikan.	ditunda pemberian Tanda Daftar melengkapi/memenuhi ketentuan dan apabila batas waktu tersebut
Tembusan: 1. Bupati Aceh Utara 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD 3. Arsip	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
*) Coret yang tidak perlu	NIP.